



LEMBARAN KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 6

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor

6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
17. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);

21. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama, (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
27. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Girikarto kepada BUMKal Bangun Karya Girikarto (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Girikarto kepada BUMKALMA MITRA LESTARI PANGGANG (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO
dan
LURAH GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp <u>3.902.521.582,00</u>
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 3.938.466.445,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (35.944.863,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 115.944.863,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 80.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 35.944.863,00</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH GIRIKARTO,

ttd

SUMARDIYONO

Diundangkan di Girikarto
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK GIRIKARTO,

ttd

SUPARMAN

LEMBARAN KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.681.107,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.910.696.975,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.730.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.120.108.082,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	912.844.740,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.662.413.768,00	
5.3.	Belanja Modal	1.432.565.367,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.748.645,00	
	JUMLAH BELANJA	4.152.572.520,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.464.438,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	112.464.438,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	112.464.438,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.464.438,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIKARTO, 31 December 2024

LURAH

SUMARDIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.681.107,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.910.696.975,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.730.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.120.108.082,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.802.656.898,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.176.346.008,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.280.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	748.477.500,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	748.477.500,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.039.460,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	50.039.460,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	117.576.138,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.506.138,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	20.070.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	24.940.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.940.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.062.480,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.062.480,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.922.650,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.922.650,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.000.000,00	DLL
	1.1.99 5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	299.285.590,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.525.000,00	PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.347.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.347.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	196.700.150,00	DDS, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.210.150,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	190.490.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	33.807.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	32.847.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	16.175.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.642.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.642.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	15.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.97		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Desa	2.589.440,00	ADD
1.2.97	5.3.	Belanja Modal	2.589.440,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	85.965.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	47.205.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	43.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.860.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.550.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	15.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	11.350.000,00	PBH
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	189.355.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.850.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.095.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.095.000,00	PBH, PBP
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.720.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.720.000,00	PBH
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.210.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.210.000,00	PBH
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.050.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	PBH
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.850.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	PBH
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	DDS, PBP
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	51.675.300,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.425.300,00	PBH
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.250.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	25.125.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.125.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	35.000.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
1.4.93	5.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	PBH
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.530.000,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	51.705.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.205.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	49.500.000,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.819.212.977,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	84.620.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.420.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.420.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	45.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	344.045.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	158.980.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.980.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	8.525.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.060.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.060.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.570.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	60.900.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	19.750.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.260.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.260.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	670.592.512,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	14.322.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	13.882.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	131.555.000,00	DDS, PBH
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	129.130.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	210.866.070,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	209.126.070,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	310.149.442,00	DDS, DLL
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.584.050,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	308.565.392,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3.700.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	119.365.465,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	40.690.465,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	39.015.465,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.500.000,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	40.175.000,00	PBH
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.175.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.567.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	26.567.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.617.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	24.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	574.023.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	65.908.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.328.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	63.580.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	22.900.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.285.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.285.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	227.280.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.280.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	254.650.000,00	PBH, PBP
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	249.870.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>231.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.375.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.705.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	5.040.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.630.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	3.000.000,00	PBH
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	143.245.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	27.130.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	14.870.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.870.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	11.405.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.405.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	6.825.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	49.150.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.150.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	33.865.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.865.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.880.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.340.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.540.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	58.750.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.450.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.145.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.145.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.285.000,00	DDS, PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.285.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.205.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.205.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	11.525.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.525.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.530.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.460.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	12.150.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>154.704.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	129.629.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	127.009.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.009.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.620.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.380.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	8.030.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.350.000,00	PBP
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.910.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.910.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.515.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.515.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.515.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.270.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.748.645,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.748.645,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.748.645,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.748.645,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.152.572.520,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32.464.438,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	112.464.438,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	32.464.438,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIKARTO, 31 December 2024

LURAH

SUMARDIYONO